

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu. Telp : (0451) 456885, 411289, 428503

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Renja (Rencana Kerja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025. Renja 2025 ini mengacu pada Perubahan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun.

Renja Tahun 2025 disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan industri dan perdagangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Renja Tahun 2025 diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terlaksana dengan baik, sesuai harapan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Demikian Renja ini disusun, diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan untuk rencana tindak kegiatan bagi seluruh aparatur OPD Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Palu 20 JUN 2024

Plh. Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah,



MIRA YULIASTUTI,ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

Renja 2025 Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2021	7
2.1.1 Pelaksanaan APBD TA 2024	7
2.1.2 Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra	8
2.1.3 Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target....	36
2.1.4 Realisasi Program yang Memenuhi Target	36
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	36
2.2.1 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	36
2.2.2 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian.....	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	39
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan SKPD	39
2.3.1.1 Bidang Industri.....	39
2.3.1.2 Bidang Perdagangan.....	39
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD	42
2.3.2.1 Permasalahan Urusan Perdagangan.....	43
2.3.2.2 Permasalahan Urusan Perindustrian	43
2.3.3 Tantangan dan Potensi.....	43
2.3.3.1 Tantangan dan Potensi Urusan Perdagangan.....	43
2.3.3.2 Tantangan dan Potensi Urusan Perindustrian.....	43
2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.....	44
2.3.4.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis Urusan Perdagangan.....	44
2.3.4.2 Rekomendasi dan Catatan strategis Urusan Perindustrian.....	46
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	78
3.1.1 Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian	78
3.1.2 Program Prioritas Nasional Kementerian	

Perdagangan	78
3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2021	79
3.3 Program dan Kegiatan	84
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2024	
4.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	99
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian	101
5.3 Kaidah-kaidah pelaksanaan	101
5.4 Rencana tindak lanjut	101

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Perbandingan realisasi anggaran tahun 2021 - 2023	7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025	9
Tabel 2.3 Rekapitulasi Program yang tidak memenuhi target Indikator Kinerja Tahun 2022	36
Tabel 2.4 Rekapitulasi Program yang memenuhi target Indikator Kinerja Tahun 2022	36
Tabel 2.5 Neraca Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022	37
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2022	38
Tabel 2.7 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024	48
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	80
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	82
Tabel 3.3 Pagu anggaran Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	84
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024	88
Tabel 4.1 Usulan Program/Kegiatan Kabupaten / Kota Tahun 2024	100

DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Provinsi	3

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

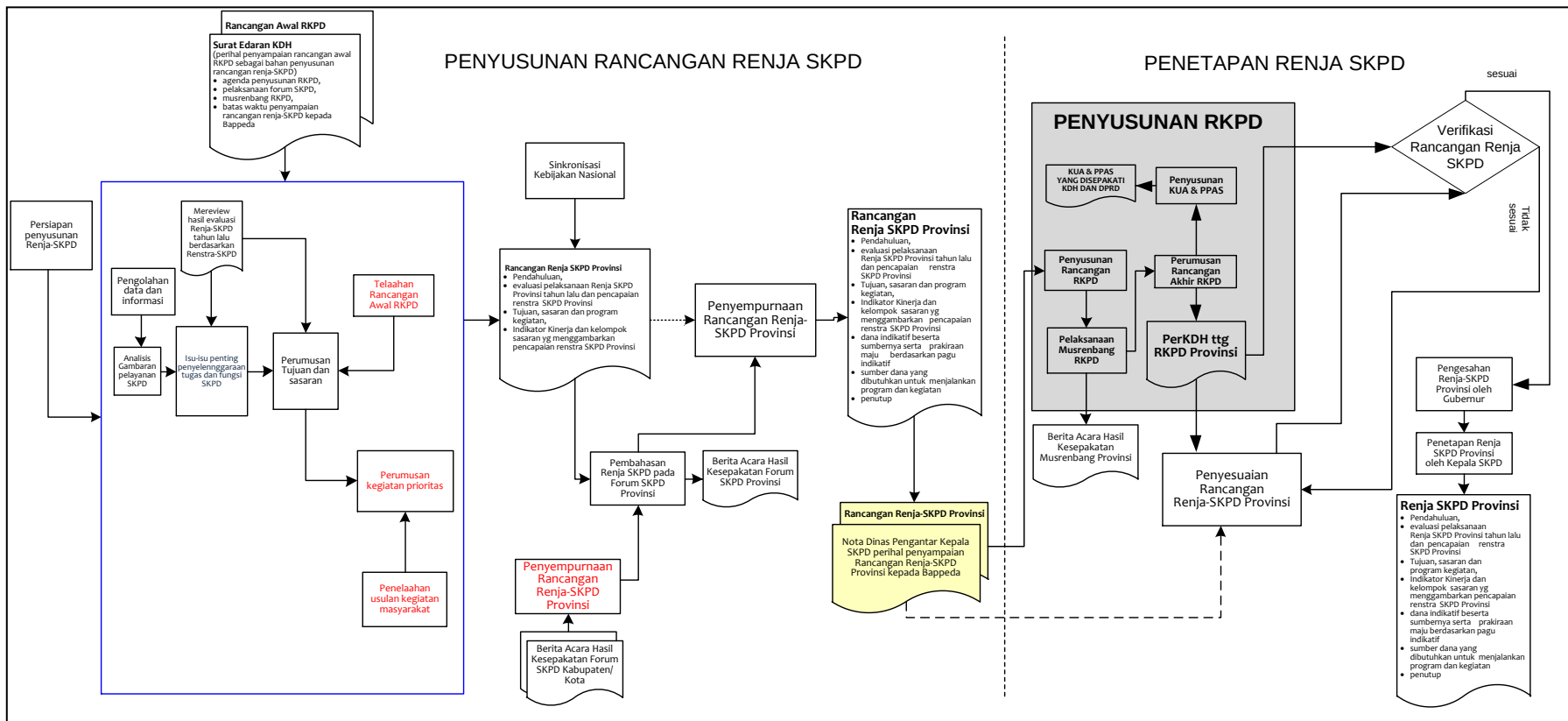
Renja SKPD penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Tiap SKPD berkewajiban menyusun Renja sebagai satu kesatuan sistem perencanaan nasional, yang berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berjalan.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangat menentukan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2025 diperlukan keselarasan dan kesinambungan program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dimana secara teknis pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) melalui dokumen Rencana Kerja.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perindustrian dan perdagangan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Renja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. dan penerjemahan visi, misi, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2021-2026. Disamping itu Renja SKPD Tahun 2025 ini dapat menggambarkan agenda ataupun rencana program, strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan sektor Industri dan Perdagangan. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada Tahun 2025. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Provinsi tersaji pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Provinsi

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah sebagai :

1. Dokumen perencanaan OPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan untuk periode satu tahun bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sarana untuk melaksanakan keterpaduan pelaksanaan program dengan unit kerja lainnya melalui koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap program kegiatan dalam pencapaian target dan sasaran kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan tujuan
- 1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV . Telaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bab V . P E N U T U P

- 4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Pelaksanaan APBD TA 2023

Hasil pelaksanaan APBD pada Tahun 2023 dicapai berdasarkan 2 (dua) aspek yaitu anggaran dan kinerja. Pada aspek realisasi anggaran dapat dibagi menjadi APBD dan APBN. Realisasi APBD dibagi menjadi Belanja langsung dan Belanja tidak langsung

Belanja langsung 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.086.530.535 dengan realisasi Rp.18.621.286.577 (97,56%) dengan realisasi fisik sebesar 99%.

Belanja Tidak Langsung Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.677.200.481 dngan realisasi Rp. 10.374.036.564 (88,84%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Belanja APBN Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.108.645.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.092.141.430 (99,22%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Total keseluruhan pagu belanja Tahun 2023 sebesar Rp32.119.116.666 dengan realisasi total sebesar Rp. 30.329.441.541 (94,43%).

Perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2021 - 2023 tersaji pada tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Perbandingan Realisasi Anggaran
Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A.	APBD	30.054.871.223	37.926.191.463	30.763.731.016	
I.	BELANJA LANGSUNG	19.645.942.472	27.243.917.500	19.086.530.535	
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.408.928.751	10.682.273.963	11.677.200.481	
B.	APBN	2.084.108.000	1.999.918.242	2.108.645.000	
	JUMLAH	32.138.979.223	39.926.109.705	32.872.376.016	
	(A+ B)				

2.1.2 Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-3)2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023			target program/kegiatan(re nja perangkat Daerah Tahun n-1)2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d (n-1)2024	Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra %	
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10	11	12
3 3 0 0 1	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05	0	64	0	0	66			
3 3 0 0 1 1.0	Keg.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	BB		67		0	B			
3 3 0 0 1 1.0	Sub Keg.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100	1			
3 3 0 0 1 1.0	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1			
3 3 0 0 1 1.0	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1			

3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90	95.0629	90	82	91	90			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	95	105	95	90	125			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	0	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	500	500	125	25	500			
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	12	6	50	12			
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	15	15	12	80	15			

3	3	0	1.0	Sub	Pengelolaan dan	Jumlah Dokumen Bahan	5	5	5	3	60	5			
0	1	2	Keg.		Penyiapan Bahan	Tanggapan Pemeriksaan									
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	14	14	14	4	29	14			
0	1	2	Keg.		Penyusunan Laporan	Keuangan Bulanan/									
					Keuangan	Triwulanan/Semesteran									
					Bulanan/Triwulanan/Se	SKPD dan Laporan									
					mes teran SKPD	Koordinasi Penyusunan									
						Laporan Keuangan									
						Bulanan/Triwulanan/Semest									
						eran SKPD									
3	3	0	1.0	Sub	Penyusunan Pelaporan	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	100	1			
0	1	2	Keg.		dan Analisis Prognosis	Pelaporan dan Analisis									
					Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi									
						Anggaran									
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi Barang	Jumlah Laporan	14	14	14	0	0	14			
0	1	3			Milik Daerah pada	Pengelolaan Barang Milik									
					Perangkat Daerah	Daerah									
3	3	0	1.0	Sub	Pengamanan Barang	Jumlah Dokumen	10	10	10	2	20	10			
0	1	3	Keg.		Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang									
						Milik									
						Daerah SKPD									
3	3	0	1.0	Sub	Pembinaan,	Jumlah Laporan Hasil	1	1	1	1	100	1			
0	1	3	Keg.		Pengawasan, dan	Pembinaan, Pengawasan,									
					Pengendalian Barang	dan Pengendalian Barang									
					Milik Daerah pada	Milik Daerah pada									
					SKPD	SKPD									
3	3	0	1.0	Sub	Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan	2	2	2	1	50	2			
0	1	3	Keg.		Penyusunan Laporan	Rekonsiliasi dan									
					Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan									
					pada SKPD	Barang Milik Daerah pada									
						SKPD									
3	3	0	1.0	Sub	Penatausahaan Barang	Jumlah Laporan	1	1	1	1	100	1			
0	1	3	Keg.		Milik Daerah pada	Penatausahaan Barang									
					SKPD	Milik									
						Daerah pada SKPD									
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi	Indeks Kepuasan	A	B	79	B	#VALU	B			
0	1	5			Kepegawaian	Masyarakat					E!				
					Perangkat Daerah	(customer/stokeholder)									
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Pakaian	Jumlah Paket Pakaian	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
0	1	5	Keg.		Dinas Beserta Atribut	Dinas Beserta Atribut									
					Kelengkapannya	Kelengkapan									
3	3	0	1.0	Sub	Pendataan dan	Jumlah Dokumen	4	4	4	2	50	4			
0	1	5	Keg.		Pengolahan	Pendataan dan									

					Administrasi Kepegawaian	Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
3	3	0	1.0	Sub	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	10	25	7	28	18			
3	3	0	1.0	Sub	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44	36	60	60	100	42			
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100	1			
0	0	1	6			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	0	0	0	#DIV/0!	4			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	1	25	4			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	4	1	25	4			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	1	25	4			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	3	25	12			
3	3	0	1.0	Sub	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78	50	50	26	52	76			
3	3	0	1.0	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100	1			
0	0	1	7			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!	3			

3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	2	3	0	0	#DIV/0!			
0	1	7	Keg.		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan		0	0	0	#DIV/0!	5		
0	1	7	Keg.		Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	1	0	0	#DIV/0!	16		
0	1	7	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	14	21	15	71	1		
0	1	7	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	#DIV/0!	1		
0	1	7	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	#DIV/0!	1		
0	1	7	Keg.											
3	3	0	1.0	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100	13		
0	1	8				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!	1		
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13	1	1	1	100	13		
0	1	8	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	3	25	12		
0	1	8	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	0	#DIV/0!			
0	1	8	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4	1	25	4		
0	1	8	Keg.											

3	3	0	1.0	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100				
	0	1	9			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36	35	35	35	100	35			
	0	1	9	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	0	#DIV/0!				
	0	1	9	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	0	0	0	#DIV/0!	5			
	0	1	9	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	117	115	115	100	110			
	0	1	9	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	0	#DIV/0!				
	0	1	9	Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1			
	0	1	9	Keg.											
								0			#DIV/0!				
3	3	0		Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi SIUP B2/MB-Gol.B /MB Gol. C	100	100	100	100	100	100		#REF!	
	0	2				Persentase penerbitan SKA	100	100	100	100	100	100		#REF!	

3	3	0	1.0	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	1	0	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Keg.	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	1	1	0	0	#DIV/0!	1			

3	3	0	1.0	Sub	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1	1	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	1	0	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1	1	1	1	100				
3	3	0		Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100				
3	3	0	1.0	Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	100	1	1	0	0				
3	3	0	1.0	Sub	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1	0	1	1	100				

3	3	0	1.0	Sub	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	2	0	2	1	50			#REF!	
3	3	0		Prog.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100	100	100	0	0			#REF!	
3	3	0	1.0	Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1	1	1	1	100			#REF!	
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4	4	4	1	25				
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4	0	4	1	25				
3	3	0	1.0	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	1	1	1	1	100				
3	3	0	1.0	Sub	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4	4	4	2	50				

3	3	0	1.0	Sub	Operasi Pasar dalam	Jumlah Laporan	6	6	6	2	33				
0	4	2		Keg.	rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
3	3	0	1.0	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	100	97.575	100	0	0				
0	4	3													
3	3	0	1.0	Sub	Pengawasan Penyaluran	Jumlah Laporan	1	0	0	1	#DIV/0!				
0	4	3		Keg.	dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%									
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	1	1	1	1	100				
0	4	3		Keg.	Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida									
3	3	0		Prog.	Pengembangan	Nilai ekspor	12,023	19016.7	9,082.0	1,529	17				
0	5				Ekspor			4	0						
3	3	0	1.0	Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1	1	1	1	100				
0	5	1													
3	3	0	1.0	Sub	Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha	9	3	3	0	0		6		
0	5	1		Keg.	Internasional/Nasional	yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang									

3	3	0	1.0	Sub	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	30	37	24	0	0	24			
0	5	1		Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	2	2	2	0	0	2			
0	5	1		Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10	60	10	0	0	10			
0	5	1		Keg.											
3	3	0		Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	20	20.05	20	20	100	20			
0	7														
3	3	0	1.0	Keg.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
0	7	1													
3	3	0	1.0	Sub	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	3	0	0	0	#DIV/0!	3			
0	7	1		Keg.											
3	3	0	1.0	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	0	1	1	100	1			
0	7	2													
3	3	0	1.0	Sub	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25	0	60	0	0	25			
0	7	2		Keg.											
3	3	0	1.0	Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	1	1	1	100	1			
0	7	3													
3	3	0	1.0	Sub	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	1	1	0	0	1			
0	7	3		Keg.											

3	3	0		Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	391	100	0	0	100			
3	3	0	1.0	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1	1	1	0	0	1			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3	2	3	1	33	1			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	2	2	1	50	2			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	0	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1	1	1	100	1			

3	3	0		Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	100	100	100	0	0	100			
1	3														
3	3	0	1.0	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1	1	1	1	100	1			
1	3	1													
3	3	0	1.0	Sub	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1	1	1	1	100	1			
1	3	1		Keg.											

3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1	1	1	1	100	1	101		
3	3	0		Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	67	83.108108	63	0	0				
3	3	0	1.0	Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	1	1	1	100	1			
								0					0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-3)2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023			target program/kegiatan(re nja perangkat Daerah Tahun n-1)2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d (n-1)2024	Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra %	
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10	11	12
3 3 0 0 1	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05	0	62	0	0	66			
3 3 0 0 1 2	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90	98.169685	90	0.00	0	90.00			
3 3 0 0 1 2	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100	1			
3 3 0 0 1 3	Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3 3 0 0 1 3	Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	0	0	0	#DIV/0!	4			
3 3 0 0 1 3	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	0	0	0	#DIV/0!	4			
3 3 0 0 1 5	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3 3 0 0 1 5	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	0	0	0	#DIV/0!	8			

3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi Umum	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100	1			
0	1	6			Perangkat Daerah	ketatausahaan dan kepegawaian									
						Jumlah Laporan	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
						Penyediaan Barang dan Jasa									
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket	1	1	1	1	100	1			
0	1	6		Keg.	Instalasi	Komponen Instalasi									
					Listrik/Penerangan	Listrik/Penerangan									
					Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan									
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan	1	1	1	1	100	1			
0	1	6		Keg.	dan Perlengkapan	Perlengkapan Kantor									
					Kantor	yang Disediakan									
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
0	1	6		Keg.	Logistik Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan									
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	1	1	1	1	100	1			
0	1	6		Keg.	Cetakan dan	Cetakan dan Penggandaan									
					Penggandaan	yang Disediakan									
3	3	0	1.0	Sub	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
0	1	6		Keg.	Tamu	Kunjungan Tamu									
3	3	0	1.0	Sub	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	1	1	1	1	100	1			
0	1	6		Keg.	Koordinasi dan	Penyelenggaraan Rapat									
					Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
3	3	0	1.0	Keg.	Pengadaan Barang	Jumlah dokumen	1	1	0	0	#DIV/0!	1			
0	1	7			Milik Daerah	ketatausahaan dan kepegawaian									
					Penunjang Urusan	Jumlah Laporan	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
					Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	0	0	0	0	#DIV/0!				
0	1	7		Keg.	Perorangan Dinas atau	Perorangan Dinas atau									
					Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Jabatan									
					Jabatan	yang Disediakan									
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
0	1	7		Keg.	Dinas Operasional atau	Dinas Operasional atau									
					Lapangan	Lapangan yang Disediakan									
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
0	1	7		Keg.		Disediakan									

3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	4	0	0	#DIV/0!	6			
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100	1			
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100	1			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4	3	4	3	75	4			

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Dibayarkan Pajaknya									
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	4	4	100	4			
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	0	0	0	#DIV/0!	8			
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	7	7	7	100	7			
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	0	0	#DIV/0!	2			
3	3	0		Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	3	16.01	3	0	0	3			
3	3	0	1.0	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80.22	77	0	0	77			
						Indeks Kinerja PSMB	4	3	3	3	100	4			
3	3	0	1.0	Sub	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	4	2	3	0	0	3			
3	3	0	1.0	Sub	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1	1	1	0	0	1			
3	3	0	1.0	Sub	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	2	1	2	0	0	12			
3	3	0	1.0	Sub	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	165	158	150		0	155			
								0							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-3)2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023			target program/kegiatan(re nja perangkat Daerah Tahun n-1)2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan		catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d (n-1)2024	Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra %	
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10	11	12
3 3 0 0 1	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05	0	62	0	0	66			
3 3 0 0 1 2	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90	98.201271	90	0.00	0	90.00			
3 3 0 0 1 2	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100	1			
3 3 0 0 1 3	Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		0	0	0	#DIV/0!				
3 3 0 0 1 3	Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	0	#DIV/0!				
3 3 0 0 1 3	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	0	#DIV/0!				
3 3 0 0 1 5	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	A	0	0	0	#DIV/0!	B			

3	3	0	1.0	Sub	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100				
	0	1	6			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1	2	0	0	2			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	1	50	2			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Sub	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	0	1	#DIV/0!	1			
	0	1	7			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	0	0	#DIV/0!				

3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0		#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	3	0	0	#DIV/0!	6			
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100				
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	2	1	50	2			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	0	0	1			
3	3	0	1.0	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100	1	1	1	100				
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!	1			

3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	6	8	8	100	8			
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	43	35	35	100	40			
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	0	0	#DIV/0!	2			
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0		Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Layanan IKM	100	100	100	100	100	100			
3	3	0	1.0	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	1135	905	959	0	0	1,044			
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	2	2	2	100	2			
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023			target program/kegiatan(re nja perangkat Daerah Tahun n-	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah		catatan	

						(Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2025	3)2022				1)2024	Sampai Dengan Tahun Berjalan			
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d (n-1)2024	Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra %		
1			2		3		4	5	6	7	8=7/6x100	9	10	11	12
3	3	0		Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05	0	62		0	66			
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90	98.593779	90	0.00	0	90.00			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100	1			
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	A	0	0	0	#DIV/0!	B			
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	0	0	0	#DIV/0!	3			
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100				

[illegible]

3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Gedung	Jumlah Unit Gedung	-	0	0	0	#DIV/0!				
0	1	7		Keg.	Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									
3	3	0	1.0	Sub	Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan	1	5	0	0	#DIV/0!				
0	1	7		Keg.	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									
3	3	0	1.0	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100				
0	1	8				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	#DIV/0!				
0	1	8		Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100				
0	1	8		Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	0	#DIV/0!				
0	1	8		Keg.											
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	1	1	100				
0	1	8		Keg.											
3	3	0	1.0	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	1	1	100				
0	1	9				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	0	0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	0	4	4	100	1			
0	1	9		Keg.											

3	3	0	1.0	Sub	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	1	4	0		#DIV/0!			
0	1	9		Keg.	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	0		#DIV/0!			
0	1	9		Keg.										
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	41	5	5	100	5		
0	1	9		Keg.										
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	0	0	#DIV/0!	1		
0	1	9		Keg.										
3	3	0	1.0	Sub	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	#DIV/0!			
0	1	9		Keg.										
3	3	0		Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	90	100	90	0	0	100		
0	6													
3	3	0	1.0	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	1	1	1	1	100	1		
0	6	1												
3	3	0	1.0	Sub	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	5	4	4	4	100	4		
0	6	1		Keg.										
3	3	0	1.0	Sub	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1	1	1	1	100	1		
0	6	1		Keg.										
3	3	0	1.0	Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25	39	40	0	0	42		
0	6	1		Keg.										

Konsumen																
3	3	0	1.0	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	1	1	1	1	100	1				
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2	2	2	2	100	2				
3	3	0	1.0	Sub Keg.	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	4	5	6	0	0	8				
								0								
								0								

2.1.3 Realisasi Program yang tidak memenuhi target

Tabel. 2.3
Rekapitulasi Program yang tidak memenuhi target
Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Nama Program		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1.	Pengembangan Ekspor	1	Nilai Ekspor	Juta	21.108,57	19.358,93	
	Jumlah			Rata-Rata			

2.1.4 Realisasi Program yang memenuhi target

Tabel. 2.4
Rekapitulasi Program yang memenuhi target
Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Nama Program		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen		90	100	
	Jumlah			Rata-rata			

Faktor penyebab tercapainya target indikator kinerja antara lain:

1. Bertumbuhnya 3 industri besar di Sulteng selama tahun 2023 dari target pertumbuhan 3 industri besar.
2. Meningkatnya Ketahanan Industri Melalui Pemberian Fasilitas menyelenggarakan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
 - b. Kegiatan Perluasan Penerapan Standar Industri

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Pembangunan dalam bidang perdagangan sangat penting dilakukan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan

peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Selama Desember 2023, total ekspor senilai US\$1.655,92, naik US\$48,39 Juta atau 3,01 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan total impor senilai US\$1.048,70 juta naik US\$114,06 juta atau 12,20 persen dibandingkan bulan sebelumnya. neraca perdagangan Sulawesi Tengah cenderung meningkat, pada tahun 2022 senilai US\$ 8.659,53 juta dan senilai US\$ 10.181,85 juta pada Tahun 2023. Kontribusi terbesar berasal dari besi dan baja dengan negara tujuan utama ekspor Tiongkok. Tabel neraca perdagangan Sulawesi Tengah tahun 2019-2023 tersaji pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Neraca Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor	5.893,47	7.480,65	12.139,52	19.016,73	19.345,57
Impor	3.134,92	2.384,94	7.153,36	10.357,2	9.163,72
NeracaPerdagangan	2.758,55	5.095,71	4.986,16	8.659,53	10.181,85

Sumber : BPS Sulteng 2023

Untuk capaian kinerja tahun 2023 urusan perdagangan lainnya juga dapat dilihat pada indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan target tahun 2023 sebesar 5,80 persen terealisasi 5,82 persen dengan persentase capaian sebesar 83,9 persen.

2.2.2 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Capaian kinerja urusan perindustrian tahun 2023 yang dilaksanakan melalui indikator kinerja kunci untuk pertumbuhan industri besar dari target 7,8 persen terealisasi sebesar 24,26 persen, dengan persentase capaian sebesar persen.

Sedangkan untuk indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sulawesi Tengah, capaian kinerjanya telah melampaui target yang diharapkan dalam Renja 2023 dengan target sebesar 32,00 persen, dengan realisasi mencapai sebesar 40,37 persen. Dari hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 secara umum capaian kinerja urusan Perindustrian telah melampaui target.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2023 tersaji pada tabel 2.6 berikut

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2023

NO	Indikator	I K K	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Aspek Pelayanan Umum											
	Pelayanan Urusan Pilihan											
	Perdagangan											
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		10,59	10,99	6,70	6,80	5,80	20,07	7,07	6,38	5,71	5,82
2	Ekspor bersih perdagangan (jt USD)		1000	1100	3,828,92	5,203,94	9,525,7	2,758,55	5,095,71	4,986,17	8.659,74	10.222,22
3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)				4-6	4-6	4-6			10,81	7,9	6,90
5	Inflasi pangan bergejolak (%)				3-5	3-5	3-5			2,54	4,14	5,98
	Urusan Perindustrian											
6	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)				11,37	11,69	32,00			31,9	37,59	37,2
7.	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)				1,097	1,371	13,000			11,092,96	17.087,26	17,116,22
8	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)				67.823	67.911	134.490			101.238	133.238	134.913
9	Cakupan bina pelaku IKM (persen)				13,83	11-14	11-14			14,2	12,43	15,23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

2.3.1.1 Bidang Industri

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun sebelumnya, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Disperindag, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.
2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.
3. Memaksimalkan pembangunan sentra IKM khususnya di Kabupaten Morowali Utara, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan: fasilitas pembentukan pengurus, meningkatkan kemampuan kegiatan usaha, mendirikan unit pelayanan teknis, pendidikan dan pelatihan bagi TPL dan konsultan bagi SIKIM di kabupaten/kota se Sulawesi Tengah;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan secara efektif Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2018-2038 dan memaksimalkan pembentukan peraturan daerah Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) diseluruh kabupaten/kota Sulawesi Tengah khususnya untuk Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Morowali dan Buol;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah akan memfasilitasi sertifikat halal produk pangan, fasilitasi pendampingan dan sertifikasi GMP bagi IKM pangan, fasilitasi pengujian nutrisi produk IKM pangan sosialisasi legalitas usaha pada 13 (tiga belas) kabupaten/kota Sulawesi Tengah;

6. Perlu dilakukan pendataan yang valid dan menyeluruh terutama tentang jumlah IKM di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan melakukan pemetaan IKM-IKM unggulan daerah.
7. Perlu pendataan perusahaan dan IKM besar yang mampu dan layak agar mampu di masukan kedalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
8. Izin makanan dalam negeri rumah coklat belum dapat di terbitkan karena gedung sebagai tempat produksi harus di renovasi dan kedepannya makanan dalam negeri tersebut dapat segera diterbitkan.
9. Meningkatkan sarana prasarana dan SDM aparatur pembina teknis/tenaga teknis teknis/operator mesin produksi baik rumah coklat, rumah tenun maupun rumah kemasan yang ada di provinsi/kabupaten/kota.

2.3.1.2 Bidang Perdagangan

1. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.
2. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
3. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
4. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.
5. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, yang diindikasikan oleh tingkat inflasi yang terkendali, terutama inflasi kelompok bahan makanan melalui pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok
6. Revitalisasi sistem informasi harga barang kebutuhan pokok dengan menjadikan pedagang di pasar-pasar barometer baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota di

Sulawesi Tengah yang dapat di jadikan sebagai big data dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Pelaksanaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat harus mengacu pada pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang telah ditetapkan oleh menteri perdagangan setiap tahun:
 - a) Pemerintah daerah penerima dana tugas pembantuan diharapkan lebih proaktif dalam proses pengajuan hibah.
 - b) Terkait pembangunan pasar yang terjadi permasalahan pada Kabupaten Toli-Toli atas keterlambatan pembangunan pasar agar dapat mengikuti anjuran KPPN dan tidak untuk melaksanakan pembangunan pasar tersebut dengan menggunakan biaya sendiri.
8. Terdapat beberapa kendala operasional dalam pelaksanaan sistem resi gudang, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan gudang dan sarana prasarana penunjang, terutama pengelola gudang, akses pemasaran terhadap produk resi gudang serta ketersediaan lembaga pembiayaan. Selain itu, perlu dilakukan sinergi kebijakan terkait implementasi sistem resi gudang antara pemerintah pusat dan daerah terutama dukungan dan komitmen pemerintah daerah.
9. Melakukan koordinasi pengawasan provinsi dan kabupaten dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah.
10. Dalam rangka memaksimalkan pembentukan unit kemetrolagian legal provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah didorong untuk menjadi fasilitator dalam penyusunan kerja sama.
11. Pemerintah daerah penerima dana tugas pembantuan diharapkan lebih pro aktif dalam proses pengajuan hibah dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik itu pengelola pasar, pedagang, maupun konsumen salah satunya dengan melakukan “Program Pelatihan Tektik Pengelolaan Pasar”.
12. Pemerintah provinsi diharapkan turut memantau pembangunan pasar rakyat oleh pemerintah kabupaten dan kota yang telah mendapatkan bantuan tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
13. Dalam rangka meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengembangan produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing, yang dilakukan melalui strategi menentukan produk

unggulan yang berorientasi ekspor berdasarkan sektor prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah;

14. Meningkatkan mutu produk ekspor dapat dicapai melalui peningkatan kelembagaan mutu di provinsi dan peningkatan pengawasan mutu.
15. Peningkatan akses dan pangsa pasar di dalam negeri dan luar negeri meliputi:
 - a. Pangsa pasar produk Sulawesi Tengah di pasar domestik
 - b. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi utama
 - c. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi prospektif

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi yang dipandang sebagai kelemahan dan berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi, antara lain:

2.3.2.1 Permasalahan Urusan Perdagangan

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri yang terintegrasi;
2. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat khususnya di daerah yang rawan gempa, tsunami dan likufaksi harus mempertimbangkan dan memperhatikan zona aman bencana yang telah ditetapkan oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) atau RTRW Provinsi Sulawesi Tengah;
3. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang, olehnya itu di harapkan kepada kabupaten/kota agar dapat mengusulkan komoditas unggulan daerahnya untuk dilakukan pengujian dan mendapatkan sertifikasi mutu, sesuai dengan standar pengujian yang ada di UPT. PSMB.
4. Perlunya komunikasi yang intens Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengenai usulan program kegiatan kabupaten/kota yang didanai oleh dana DAK melalui aplikasi Krisna Simlaras di BAPENAS agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penetapan rekomendasi usulan.
5. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G);

6. Perubahan regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perdagangan yang berlangsung cepat;
7. Rendahnya pemahaman, tahapan, dan regulasi perizinan oleh pemilik usaha;

2.3.2.2 Permasalahan Urusan Perindustrian:

1. Rendahnya daya saing, kualitas, dan inovasi produk industri
2. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pelaku usaha
3. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang, berpengaruh terhadap harga jual produk;
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai
5. Minimnya biaya operasional pembinaan dan pendataan serta informasi yang valid dan up to date terkait dengan pelaku usaha
6. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen;
7. Rendahnya produktivitas dan efisiensi serta desain produk industri.
8. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastaan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang;
9. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.3 Tantangan dan Potensi

2.3.3.1 Tantangan dan Potensi Urusan Perdagangan

1. Arus distribusi bahan kebutuhan pokok ke daerah-daerah lancar.
2. Ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat terjamin.
3. Kondisi keamanan daerah yang aman dan kondusif.
4. Iklim investasi yang mendukung .
5. Revitalisasi pasar.
6. Penguatan kapasitas SDM untuk usaha informal.
7. Adanya sarana publikasi dan promosi tingkat nasional.

2.3.3.2 Tantangan dan Potensi Urusan Perindustrian

1. Potensi bahan baku cukup memadai.
2. Banyak instansi/lembaga yang menyalurkan bantuan.

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas Tahun 2023 dapat diformulasikan sebagai berikut :

2.3.4.1 Rekomendasi dan catatan strategis Urusan Perdagangan

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pengawasan Peredaran Barang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, namun karena keterbatasan manusia dan anggaran pada pemerintah provinsi, dimungkinkan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten/kota dapat melakukan pengawasan barang atau jasa melalui pintu pengawasan BDKT atau pengawasan dalam rangka Perlindungan Konsumen.
2. Dalam rangka menstabilkan harga komoditi pertanian, perkebunan dan lain-lainnya, direkomendasikan dinas perindustrian dan perdagangan menindak lanjuti MOU antara Gubernur dengan Bupati terkait pengujian mutu di UPT. PSMB yang ada di Provinsi.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pengawasan tanda daftar Gudang dan diharapkan kepada daerah melakukan pendaftaran Gudang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
4. Pembangunan Pasar DAK (dana alokasi Khusus) maupun Tugas Pembantuan (TP), diharapkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan hal tersebut kiranya Kabupaten/Kota dapat memberikan data Pasar yang telah ber-SNI pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
5. Pasar Murah wajib dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dalam rangka merayakan hari besar ke-Agamaan Nasional.
6. Pelaksanaan Tera-tera ulang terhadap UTTP diharapkan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota sudah melakukan MOU dengan Pemda Kota Palu dan mendorong agar segera menyiapkan sumber daya manusia Kemetrolagian dan sarana perasarana untuk melaksanakan Tera-Tera Ulang sendiri.
7. Kabupaten/Kota dapat mendukung program Sistem Perdagangan Antar Pulau dengan memberikan data valid yang dapat dipertanggung jawabkan termasuk penginputan data Pelaku Usaha, Distributor, Sub-Distributor, dan Agen Bahan Pokok pada Tanda Daftar Perusahaan Usaha Distribusi (TDPUD).

8. Dibutuhkan data potensi komoditi yang dapat diekspor, agar hal tersebut dapat disampaikan kepada “buyer” pada kegiatan TEI (*Trade Expo Indonesia*). Data yang disajikan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.
9. Dalam rangka mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah yang berdaya saing ekspor, maka diharapkan kepada seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah segera menyusun data potensi komoditi ekspor daerahnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
10. Data potensi komoditi tersebut juga akan digunakan pada misi dagang mendatang sehingga produk unggulan Sulawesi Tengah dapat diperkenalkan pada pertemuan misi dagang tersebut.
11. Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPT. PSMB) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, karenanya diharapkan kepada Kabupaten/Kota agar dapat mengusulkan komoditas unggulan daerahnya untuk dilakukan pengujian dan mendapatkan sertifikasi mutu, sesuai dengan standar pengujian yang ada di UPT. PSMB.
12. Laboratrium UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang merupakan salah satu Laboratrium Pengujian Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Pengujian Komoditi yang telah terakreditasi terdiri dari 8 ruang lingkup, yaitu Biji Kakao, Beras, Gabah, Jagung, Kopra, Rumput Laut Cengkeh dan Biji Kopi. Untuk tahun 2018 ini, Laboratrium Pengujian akan menambah ruang lingkup pengujian akreditasi yaitu CPO (Crude Palm Oil/ Minyak Sawit Mentah, Bawang Merah, dan Derajat Sosoh Beras.
13. Dalam perkembangan saat ini, Laboratrium Pengujian UPT. PSMB juga dapat melakukan pengujian di luar ruang lingkup akreditasi dan melakukan kalibrasi alat ukur, antara lain : Garam, Minyak Nilam, Kakao Bubuk, Tepung Terigu dan Cemaran Logam, yang meliputi : hasil Pertanian, hasil Perikanan, hasil Perkebunan, Produk Hasil Olahan, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Mainan Anak, Pakaian Anak, dll. Untuk pelaksanaan tugas Kalibrasi Alat Ukur Besaran kalibrasi yaitu : Dimensi, Massa, Suhu, Volumetrik
14. Sejak tahun 2015 telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengenai peningkatan standar mutu komoditi. Untuk kabupaten/kota lainnya agar dapat melakukan penguatan

kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan masih banyaknya komoditi yang belum berstandar nasional.

2.3.4.2 Rekomendasi dan catatan strategis Urusan Perindustrian

1. Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian menegaskan bahwa setiap Gubernur, Bupati, dan Walikota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037, sementara dalam tahapan di Kemendagri. Perda RPIP akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tengah untuk segera menyusun Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).
2. Bagi kabupaten yang belum melakukan penyusunan RPIK agar segera dapat memulai dan melakukan penyusunan RPIK untuk keberlanjutan mendapatkan DAK sektor industri.
3. Kabupaten dan kota yang telah dan sedang melaksanakan kegiatan DAK SIKIM agar mempersiapkan laporan pelaksanaan DAK SIKIM.
4. Dalam rangka memfasilitasi permasalahan tentang organisasi UPT di dalam SIKIM yang merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemda, bahwa keberadaan SIKIM di kabupaten untuk membentuk UPT.
5. Dukungan koordinasi dan fasilitas dalam bentuk Bimtek dan Sosialisasi tantangan Penerapan Standar Mutu Industri dari Perindag Provinsi kepada Kab. dan Kota yang mendapatkan DAK SIKIM di sesuaikan dengan jenis SIKIM yang ada di kabupaten dan kota.
6. Adanya dukungan fasilitas baik Dinas Perindag Provinsi dan Kementerian Perindustrian terhadap ketersediaan SKKNI yang di sesuaikan dengan jenis sentra yang ada di Kabupaten dan Kota.
7. Terdapat 3 (Tiga) Kabupaten yang hanya mencantumkan nomenklatur dinas perdagangan, agar segera bisa meninjau kembali perubahan nomenklatur dinas yang memuat arah pembangunan sektor industri, karena tanpa nomenklatur Perindustrian maka kecil kemungkinan untuk mendapatkan DAK Sektor Industri.
8. Untuk menumbuhkan Wirausaha Baru di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yang Berbasis Teknologi Informasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi berkewajiban memberikan pembinaan dan pelatihan bagi generasi muda atau pelaku IKM tentang

mempromosikan Produk IKM atau membentuk Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) dengan tujuan utama untuk mencetak wirausaha baru di bidang teknologi informasi.

9. Penguatan Usaha Sektor Perdagangan

Pengembangan perdagangan yang berbasis sumber daya alam lokal dan menyerap tenaga kerja cukup tinggi, menghasilkan nilai tambah yang cukup besar, berfungsinya mekanisme pasar tanpa distorsi sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk meningkatkan pengadaan dan penyaluran barang, ekspor nonmigas, memberdayakan pelaku usaha agar produktif dan berdaya saing.

10. Peningkatan Daya Saing

Penguatan pilar-pilar otonomi dalam fungsi perencanaan pembangunan daerah antara lain dalam bentuk penerapan pendekatan pembangunan sektor perdagangan untuk mencari dan menetapkan potensi unggulan dan prospektifnya, menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha untuk menanamkan dan mengembangkan produksi, pemberian insentif dan kemudahan. Selain itu peningkatan nilai tambah produksi yang telah ada yang memiliki ciri khas dan unggul melalui penerapan teknologi maju dan tepat akan dapat meningkatkan daya saing produk Sulawesi Tengah di pasar regional, nasional dan global.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 tersaji pada tabel 2.7 berikut:

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana (Rp)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			18.885.410.659		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	66 Indeks	15.422.700.659		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Indeks		17,862,835,160.00	
3	30	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	B	731.864.065		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag			802,530,350.00	
3	30	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	664.688.115	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	672,484,150.00	
3	30	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.107.500	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	12,825,000.00	
3	30	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.757.500	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	6,050,000.00	

3	30	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.637.500	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	5,725,100.00	
3	30	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.262.800	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3,750,200.00	
3	30	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.537.900	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan		
3	30	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen	25.872.750	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	101,695,900.00	
3	30	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	12.848.003.594		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %		14,555,130,400.00	
3	30	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/	Bulan 10,979,740,269	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	12,614,592,400.00	

3	30	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.239.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1,104,600,000.00	
3	30	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	308,970,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokum	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	411,217,850.00	
3	30	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	73,293,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokume	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	160,825,200.00	
3	30	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	49.762.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	49,787,950.00	
3	30	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	79.992.325	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	98,649,000.00	
3	30	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	61.038.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	59,528,500.00	

3	30	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.239.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1,104,600,000.00	
3	30	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	308,970,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokum	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	411,217,850.00	
3	30	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	73,293,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokume	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	160,825,200.00	
3	30	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	49.762.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	49,787,950.00	
3	30	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	79.992.325	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	98,649,000.00	
3	30	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	14 Laporan	61.038.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	14 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	59,528,500.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	30	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	56.208.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	55,929,500.00	
3	30	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Laporan	211.233.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Laporan		255,093,700.00	
3	30	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokume	91,406,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokume	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	90,340,000.00	
3	30	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24.590.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	68,316,000.00	
3	30	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	31.025.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	32,599,700.00	

3	30	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan 0 Laporan	64.212.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan 0 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	63,838,000.00	
3	30	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (custumer/stokeholder)	B	110.861.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (custumer/stokeholder)		84 nilai indeks	193,296,100.00	
3	30	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	23.900.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	58,431,100.00	
3	30	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	83.001.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	78,240,000.00	
3	30	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	3.960.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	6,600,000.00	
3	30	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan	439.888.300		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan		386,135,690.00	

3	30	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.937.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	10,060,830.00	
3	30	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	155.233.200	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	112,512,210.00	
3	30	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	60.348.100	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	39,381,400.00	
3	30	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokume	52,800,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokume	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	33,600,000.00	
3	30	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan	158.570.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,581,250.00	
3	30	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	686.536.400		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		509,057,800.00	

3	30	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	356.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	300,000.00	
3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan 0 Laporan	471.820.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan 0 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	351,895,200.00	
3	30	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	214.360.400	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	165,261,620.00	
3	30	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	394.314.300		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		644,134,300.00	
3	30	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	240.934.300	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	46 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	365,934,300.00	

3	30	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	108.380.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	146 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	205,200,000.00	
3	30	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	73,000,000.00	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi SIUP B2./MB-Gol.B /MB Gol. C (%)	100 %	310.010.000		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi SIUP B2./MB-Gol.B /MB Gol. C (%)	100 %		369,309,350.00	
3	30	02	1,02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	69.455.400		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen		72,809,000.00	
3	30	02	1,02	01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	69.455.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

3	30	02	1,04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	1 Laporan	240.554.600		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	1 Laporan		
3	30	02	1,04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	240.554.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296,500,350.00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100 %	137.570.000		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100 %		227,461,700.00
3	30	03	1,01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1 Dokumen	137.570.000		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1 Dokumen		227,461,700.00
3	30	03	1,01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah laporan penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	68.785.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah laporan penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121,503,900.00
3	30	03	1,01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pengguna pasar lelang komoditas yang berpartisipasi	2 Orang	68.785.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pengguna pasar lelang komoditas yang berpartisipasi	2 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,957,800.00

3	30	03	1.01.	004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	1 kegiatan			Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	1 kegiatan			50,000,000.00	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100 %	1.643.210.000		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100 %			1,708,538,750.00	
3	30	04	1,01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	257.732.850		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen			129,265,800.00	
3	30	04	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	171.821.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79,266,100.00	
3	30	04	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	85.910.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,999,700.00	

3	30	04	1,02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	1 Dokumen	1.299.566.200		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	1 Dokumen		1,479,523,150.00	
3	30	04	1,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4 Laporan	171.821.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	261,768,650.00	
3	30	04	1,02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	1.127.744.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,217,754,500.00	

3	30	04	1,03		Pengawasan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	100 %	85.910.950		Pengawasan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	100 %		99,749,800.00	
---	----	----	------	--	---	--	-------	------------	--	---	--	-------	--	---------------	--

3	30	04	1,03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 Laporan	85.910.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,749,800.00	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	9,634.00 Juta USD	934.550.000		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	26478,59 Juta USD 6 %		737,239,900.00	
3	30	05	1,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1 Laporan	934.550.000		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1 Laporan		737,239,900.00	
3	30	05	1,01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	3 Pelaku Usaha	75.601.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	6 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	391,337,000.00	
3	30	05	1,01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	24 Pelaku Usaha	643.643.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	30 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,987,400.00	
3	30	05	1,01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	2 Produk	34.548.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	2 Produk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214,915,500.00	

3	30	05	1,01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	10 Pelaku Usaha	180.756.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	10 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi dan pemasaran produk dalam negeri yang terfasilitasi	20 %	437.370.000		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi dan pemasaran produk dalam negeri yang terfasilitasi	20 %		301,513,550.00	
3	30	07	1,01		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	358.332.700		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan promosi Produk Dalam Negeri	1 Laporan		49,999,800.00	
3	30	07	1,02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	25 UMKM	358.332.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	25 UMKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,041,750.00	
3	30	07	1,03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	79.037.300		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan		48,472,000.00	

3	30	07	1,03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	79.037.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,472,000.00	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.854.130.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					

3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %	1.234.650.000		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %		1,625,100,750.00	
3	31	02	1,01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen	1.234.650.000		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen		1,625,100,750.00	
3	31	02	1,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	2 Dokumen	270.250.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	2 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,725,250.00	
3	31	02	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	259.941.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	373,999,850.00	

3	31	02	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	556.691.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253,981,000.00	
3	31	02.1	01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	396,105,550.00	
3	31	02	1,01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 Dokumen	147.766.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219,999,900.00	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	100 %	320.430.000		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	100 % 65,17 Rp. Triliun		355,999,800.00	
3	31	03	1,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1 Laporan	320.430.000		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1 Laporan		355,999,800.00	

3	31	03	1,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	132.280.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	31	03	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	188.150.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase data industri yang terdaftar dalam SIINas	64 %	299.050.000		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase data industri yang terdaftar dalam SIINas	65,17 Rp. Triliun 66 %	65,17 Rp. Triliun 66 %	
3	31	04	1,01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	299.050.000		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	187,048,500.00	
3	31	04	1,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	66.406.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	54,008,650.00	

3	31	04	1,01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	54.129.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,723,300.00	
3	31	04	1,01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasilPemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	178.513.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasilPemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,316,550.00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.460.113.676		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks	805.283.676		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks			
3	30	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	335.560.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %		258,480,000.00	
3	30	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	335.560.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	258,480,000.00	
3	30	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan	158.903.952		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan		170,902,256.00	

3	30	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.237.452	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3,237,246.00	
3	30	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.233.550	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3,237,246.00	
3	30	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.761.950	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	25,614,150.00	
3	30	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	90.671.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,903,000.00	
3	30	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	224.039.424		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		235,459,648.00	
3	30	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.998.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	15,498,000.00	

3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	168.737.496	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	168,737,496.00	
3	30	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.303.928	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	51,224,152.00	
3	30	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	86.780.300		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan			
3	30	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1.570.300	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	4,050,000.00	
3	30	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46.450.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	50,600,000.00	
3	30	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	38.760.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	49,800,000.00	

3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	3 %	654.830.000		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	3 %		650,225,639.00	
3	30	06	1,02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kinerja PSMB	77 Nilai Indeks 3 Nilai Indeks	654.830.000		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kinerja PSMB	77 Nilai Indeks 4Nilai Indeks		650,225,639.00	
3	30	06	1,02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	3 Komoditi	137.457.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	3 Komoditi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	30	06	1,02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1 Dokumen	189.957.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	30	06	1,02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikat produk yang diterbitkan	2 Sertifikat	137.457.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikat produk yang diterbitkan	2 Sertifikat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	30	06	1,02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	150 Sertifikat	189,957,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	150 Sertifikat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,487,250.00	

					Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 laporan	300,566,064.00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	300,566,064.00
					Pemantauan Mutu Produk	<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>	4 Produk	135,165,825.00		Pemantauan Mutu Produk	<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>	4 Produk		135,165,825.00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.128.529.349		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks	1.128.529.349		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	68 Indeks		935,285,088.00
3	30	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	635.160.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %		498,360,000.00
3	30	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	635.160.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	498,360,000.00
3	30	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan	78.701.619		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan		75,310,730.00

3	30	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.264.544	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3,165,930.00	
3	30	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	47.010.325	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	28,917,800.00	
3	30	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.536.750	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	8,350,000.00	
3	30	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.890.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	12,805,000.00	
3	30	01.1	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	22,072,000.00	
3	30	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	204.917.730		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		184,594,358.00	

3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	200.885.730	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	161,944,358.00	
3	30	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.032.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	22,650,000.00	
3	30	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	209.750.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		177,020,000.00	
3	30	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	64.200.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	82,520,000.00	
3	30	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	65.550.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	94,500,000.00	
3	30	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			497.110.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					

3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase layanan IKM	100 %	497.110.000		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase layanan IKM	100 %		1,013,478,948.00	
3	31	02	1,01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	959 Layana IKM	497,110,000		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	1069 Layana IKM		1,013,478,948.00	
3	31	02	1,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	497.110.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.224.343.935		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks	569.513.935		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	68 Indeks		405,843,300.00	
3	30	01	1,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	251.160.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %		231,960,000.00	
3	30	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	251.160.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan		
3	30	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan	51.555.425		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan		77,074,600.00	

3	30	01	1,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket		21,953,250.00	
3	30	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.435.425	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	8,021,350.00	
3	30	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.120.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	47,100,000.00	
3	30	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	223.819.710		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		48,606,800.00	
3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	222.379.710	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	47,256,800.00	
3	30	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.440.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1,350,000.00	

3	30	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	42.978.800		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	48,201,900.00	
3	30	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4.018.800	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan
3	30	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	28.960.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	12,340,000.00	
3	30	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,005,000.00	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90 %	654.830.000		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90 %	1,295,419,900.00	
3	30	06	1,01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	1 Laporan	327.415.000		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	1 Laporan	1,046,614,500.00	

3	30	06	1,01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif	4 BPSK	109.138.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif	4 BPSK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	875,599,800.00	
3	30	06	1,01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	109.138.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,304,700.00	
3	30	06	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	16 Pengad	109,138,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	16 Pengad	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,710,000.00	
3	30	06	1,03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	1 Laporan	327.415.000		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	1 Laporan		248,805,400.00	
3	30	06	1,03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	2 Laporan	163.707.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	2 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,890,600.00	
3	30	06	1,03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang ditangani	4 Kasus	163.707.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang ditangani	8 Kasus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,914,800.00	
TOTAL								25.049.637.619						28.444.592.239	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian antara lain:

1. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil. Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah pengembangan industri petrokimia di Teluk Bintuni. Pengembangan industri industrial vegetable oil / industrial lauric oil (IVO/ILO), dimana IVO/ILO merupakan hasil pemrosesan CPO yang menurunkan kadar getah dan metal.
2. Kegiatan prioritas dalam rangka penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan Koperasi. Pengembangan sentra industri kecil menengah (IKM) dan mengembangkan produk IKM.
3. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Melakukan pendampingan pada pabrik untuk meningkatkan ekspor. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah ajang temu bisnis Internasional.
4. Kegiatan prioritas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0. Kemenperin berencana mengembangkan data industri 4.0 dan pembangunan pusat inovasi dan pengembangan industri 4.0.
5. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing SDM. Hal tersebut akan dilakukan melalui pelatihan industri berbasis kompetensi dan pendidikan vokasi dan kejuruan industri berbasis kompetensi menuju dual system.
6. Program Pelaksanaan Anti Korupsi.

3.1.2 Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan antara lain :

1. Pembangunan dan revitalisasi 119 unit pasar rakyat tipe C dan D.
2. Membangun pusat jajanan dan souvenir.
3. Menjalankan Program perlindungan konsumen.
4. Program optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang.
5. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting.

6. Pelaksanaan EXPO
7. Melaksanakan program misi dagang, pameran, dan promosi luar negeri.
8. Program untuk perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.
9. Program pemberian fasilitas perizinan dan fasilitas ekspor impor.
10. Program pengembangan sarana dan prasarana Kemendag.
11. Program pengembangan sumber daya manusia Kemendag.
12. Program pelaksanaan anti Korupsi.

3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :

1. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
 2. Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.
- Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan umum dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 tersaji pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20
			2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	3.828,92	5.203,94	5.849,88	6.648,15	6.903,07	7.274,98
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan		5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37%	11,69%	12,00%	12,60%	13,20%	13,80%

		2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.097	1.371	1.646	1.920	2.194	2.468
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.823	67.911	68.000	68.088	68.176	68.264
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	11-14	11-14	11-14	11-14	11-14
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	3 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	9 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,05	64,5	66,5	68,5	70	71

Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	1 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			2 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	1 Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
			2 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi

			perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	1 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			2 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	1 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			2 Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	1 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			2 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data	1 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

		perusahaan industri	2 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri
--	--	---------------------	---

3.3 Program dan Kegiatan

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 program dengan pagu anggaran tersaji pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pagu anggaran Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Program	Pembiayaan (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,973,255,452	
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2,638,579,698	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,708,538,750	
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	227,461,700	
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	301,513,550	
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1,945,645,539	
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	369,309,350	
8	Program Pengembangan Ekspor	737,239,900	
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	355,999,800	
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	187,048,500	
	Jumlah Dinas	28,444,592,239	

Pada Tahun 2024 pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 32,119,116,666 yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

- **Bidang Fasilitas dan Informasi Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- **Bidang pembinaan dan Pengembangan Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

- **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan- 2 : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Kegiatan- 3 : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 3 : Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- **Bidang perdagangan Luar Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

- **UPT – Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

- **UPT – Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah:**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

- **UPT – Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-5	-10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				23,375,047,460				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				21,206,898,410				
	Prog. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	68	17,862,835,160	APBD		68	17,537,104,555
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP Disperindag	Sulawesi Tengah	71	802,530,350	APBD		73	764,662,900
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	14,555,130,400	APBD		90	14,683,760,955
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sulawesi Tengah	14	255,093,700	APBD		14	272,208,900
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stokeholder) -	Sulawesi Tengah	84	193,296,100	APBD		85	141,007,900

	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Sulawesi Tengah	1	386,135,690	APBD		1	427,783,000
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan) (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	509,057,800	APBD		1	136,107,800
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	517,456,820	APBD		1	644,387,400
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan) (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	644,134,300	APBD		1	467,185,700
	Prog	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C (%)	Sulawesi Tengah	100	369,309,350	APBD		100	690,085,100
			-	Persentase penerbitan SKA (%)	Sulawesi Tengah	100				100	0
	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi	-	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Sulawesi Tengah	0		APBD		0	0

	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor								
	Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	- Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	72,809,000	APBD		1	109,799,900
	Keg. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	- Jumlah dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Sulawesi Tengah	0	0	APBD		0	0
	Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	- Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	296,500,350	APBD		0	580,285,200

	Prog.	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	- Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi (%)	Sulawesi Tengah	100	227,461,700	APBD		100	217,490,000
	Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	227,461,700	APBD		1	217,490,000
	Prog.	STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	- Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok (%)	Sulawesi Tengah	100	1,708,538,750			100	2,597,740,000
	Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	129,265,800	APBD		1	407,448,000
	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	1,479,523,150	APBD		1	2,054,476,000

	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (%)	Sulawesi Tengah	100	99,749,800	APBD		100	135,816,000
	Prog.	PENGEMBANGAN EKSPOR	-	Nilai ekspor (USD) Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Sulawesi Tengah	26478,59 Juta USD 6%	737,239,900	APBD			1,333,160,000
	Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	737,239,900	APBD			1,333,160,000
	Prog.	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi (%)	Sulawesi Tengah	20%	301,513,550	APBD		20%	217,169,600
	Keg.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	49,999,800	APBD		1	0

	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	203,041,750	APBD		1	92,218,800
	Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	48,472,000	APBD		1	124,950,800
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2,168,149,050	APBD			2,384,963,955
	Prog.	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Jumlah Tenaga kerja sektor Industri Pengolahan Nonmigas Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan Nonmigas Persentase kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Sulawesi Tengah	100% 138000 Orang 20 USD Miliar 27% 41,45%	1,625,100,750	APBD		100%	2,800,000,000

	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	1,625,100,750	APBD	1	2,800,000,000
	Prog.	PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	- Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis (%)	Sulawesi Tengah	100%	355,999,800	APBD		518,040,000
	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	- Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	355,999,800	APBD	1	518,040,000
	Prog.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	- Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	Sulawesi Tengah	65,17 Triliun 66%	187,048,500	APBD		572,770,000
	Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	187,048,500	APBD	1	572,770,000
	UPT. PSMB					1,419,517,543			1,561,469,297

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1,419,517,543			1,561,469,297
	Prog.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	68	769,291,904	APBD	68	846,221,094
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	258,480,000	APBD	90	331,320,000
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	170,902,256	APBD	1	195,225,900
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	0	0	APBD	1	0
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	235,459,648	APBD	1	306,943,500
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	104,450,000	APBD	1	107,131,200
	Prog.	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi (%)	Sulawesi Tengah	3	650,225,639	APBD	3	1,035,219,800
	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Sulawesi Tengah	77	650,225,639	APBD	77	1,035,219,800

		- Indeks Kinerja PSMB (Indeks)	Sulawesi Tengah	4				4	0		
	UPT. P2IPK				1,948,764,036				2,143,640,440		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				935,285,088				1,028,813,597		
	Prog.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah -	Sulawesi Tengah	68	935,285,088	APBD	68	1,028,813,597		
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran -	Sulawesi Tengah	90	498,360,000	APBD	90	575,520,000		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah -	Sulawesi Tengah		0	0		0	0	
	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian -	Sulawesi Tengah		0	0		APBD	0	0
		Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan) -		Sulawesi Tengah	1		75,310,730	APBD	1
	Keg.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan) -		Sulawesi Tengah	0		0	APBD	0
		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan) -		Sulawesi Tengah	1		184,594,358	APBD	1

	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	177,020,000	APBD		1	117,040,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1,013,478,948				1,114,826,843
	Prog.	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	- Persentase Layanan IKM	Sulawesi Tengah	100	1,013,478,948	APBD		100	785,879,600
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	1,013,478,948	APBD		1	785,879,600
	UPT P2K		-			1,701,263,200				1,871,389,520
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1,701,263,200				1,871,389,520
	Prog.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	68	405,843,300	APBD		68	446,427,630
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	231,960,000	APBD		90	251,160,000
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	77,074,600	APBD		1	137,922,600

	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	48,606,800	APBD		1	60,351,800
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	48,201,900	APBD		1	72,893,900
	Prog.	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	Sulawesi Tengah	100	1,295,419,900	APBD		100	1,835,219,800
	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	1,046,614,500	APBD		1	1,317,609,800
	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	248,805,400	APBD		1	517,610,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2024

4.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan tahun 2025 melalui insiatif dari Kabupaten/Kota, umumnya merupakan usulan para pemangku kepentingan dan wakil masyarakat dan instansi terkait lainnya yaitu guna memudahkan dan membantu pelaku usaha dalam peningkatan daya saing usaha dan peningkatan IKM serta perlindungan konsumen bagi masyarakat. Adapun usulan program/kegiatan kabupaten/kota Tahun 2025 tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Usulan Program/Kegiatan
Kabupaten / Kota Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Volume	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Tojo Una-Una				
1	Keg. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pasar Murah	1 Kegiatan	Kab.Tojo Una-Una (Kec. Ampana Kota dan Ratolindo)	
		Terlaksananya Operasi Pasar	1 Kegiatan	Kab.Tojo Una-Una (Kec. Ampana Kota dan Ratolindo)	
		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Barang Beredar	1 Kegiatan	Kab.Tojo Una-Una (Kec. Ampana Kota dan Ratolindo)	

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

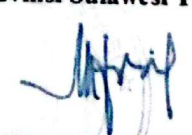
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5.3 Rencana tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik.

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Palu, 20 JUN 2024
Plh. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah,


MIRA YULASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

Renja 2025 Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah